



# DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<https://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

## Peranan Pemerintah Kota Bandung dalam Mewujudkan Tertib Bangun Melalui Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Monalisa Rattealo<sup>1</sup>, Nia Karniawati<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan<sup>1</sup>, Program Ilmu Pemerintahan,<sup>2</sup> Unikom Bandung<sup>2</sup>  
[monapolkal2502@gmail.com](mailto:monapolkal2502@gmail.com), [nia.karniawati@email.unikom.ac.id](mailto:nia.karniawati@email.unikom.ac.id)

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

*This research explores the role of the Bandung City Government in realizing orderly construction through the granting of Building Construction Permits (IMB). Through a qualitative approach with case studies, this research analyzes the mechanism for granting IMBs and law enforcement regarding development without IMBs by the government. The research results show the active role of the Bandung City Government in improving the efficiency and transparency of the IMB granting process and enforcing the law to maintain orderly development. The implication of these findings is to create a more orderly and sustainable urban environment. This research contributes to understanding the importance of the government's role in managing urban development.*

**Keywords:** Bandung City Government, Building Construction Permit (IMB), orderly construction

ABSTRAKSI

Penelitian ini mengeksplorasi peranan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangun melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis mekanisme pemberian IMB dan penegakan hukum terhadap pembangunan tanpa IMB oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan peran aktif Pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki efisiensi dan transparansi proses pemberian IMB serta menegakkan hukum untuk menjaga keteraturan pembangunan. Implikasi dari temuan ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengelola pembangunan perkotaan.

**Kata Kunci:** Pemerintah Kota Bandung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tertib bangun

## PENDAHULUAN

Di era urbanisasi yang pesat saat ini, pembangunan perkotaan menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional. Kota-kota besar merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi arah pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Kota Bandung yang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandung sebagai badan pengatur tingkat daerah mempunyai peran penting dalam mengelola pertumbuhan kota dan memastikan pembangunan infrastruktur dan bangunan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu sarana regulasi pembangunan yang penting adalah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Proses pemberian IMB merupakan langkah penting dalam menentukan sejauh mana pembangunan dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk mengkaji peran pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan konstruksi terorganisir melalui penerbitan izin mendirikan bangunan. Peran ini mencakup sejumlah aspek seperti pengembangan kebijakan, penegakan peraturan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memahami peran ini secara holistik, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh pemerintah kota dalam mengelola pembangunan dan dampaknya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

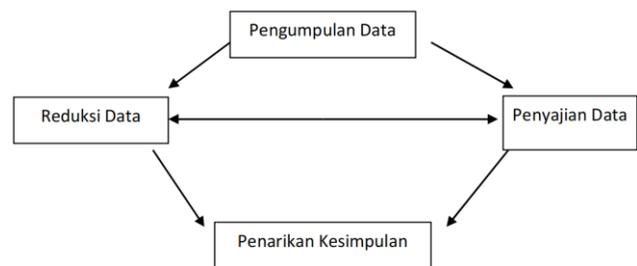
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah sosiologi hukum. Menurut Sunggono (2006:101), metode hukum sosiologis didasarkan pada permasalahan yang ada di masyarakat, dan tindakan orang-orang dalam masyarakat serta pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial. Pendekatan penelitian yang diberikan diharapkan dapat melihat

secara jelas model partisipasi masyarakat yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan masalah IMB, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum good governance.

Bahan hukum sekunder yang di gunakan penulis adalah Perda Kota Bandung No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah Kajian ilmiah, observasi, dan dokumentasi, selain itu validitas data menggunakan triangulasi sebagai parameter dalam mengkasi hasil penelitian. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.



Bagan 1. Komponen-komponen Analisis Data Kualitatif, Miles dan Huberman dalam Rachman

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan peran yang aktif dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemberian IMB. Melalui penyempurnaan mekanisme dan prosedur, Pemerintah Kota Bandung berusaha memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain memberikan IMB secara transparan, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan penegakan hukum terhadap pembangunan yang dilakukan tanpa IMB. Langkah ini menjadi penting dalam menjaga keteraturan pembangunan perkotaan dan mencegah adanya pembangunan liar yang dapat mengganggu tata ruang kota.

Penyempurnaan mekanisme dan prosedur pemberian

IMB oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan adanya proses yang lebih efisien, pemohon dapat memperoleh IMB dengan lebih cepat, sehingga tidak terjadi penundaan yang tidak perlu dalam proses pembangunan. Selain itu, transparansi dalam proses pemberian IMB juga memberikan kepastian hukum bagi para pemohon, sehingga mereka dapat melakukan pembangunan dengan lebih yakin dan terencana.

Tindakan penegakan hukum terhadap pembangunan tanpa IMB menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga keteraturan pembangunan perkotaan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat dicegahnya pembangunan yang melanggar regulasi, sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan teratur. Selain itu, tindakan penegakan hukum juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak mentolerir pelanggaran terhadap regulasi pembangunan.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangun melalui pemberian IMB memiliki implikasi yang penting dalam pembangunan perkotaan. Dengan adanya proses pemberian IMB yang efisien dan transparan, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pembangunan tanpa IMB, diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, langkah-langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem regulasi yang ada.

### **1.Regulasi yang jelas**

Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Regulasi yang jelas dan terperinci mengenai persyaratan dan prosedur pemberian IMB sangat penting untuk menciptakan tertib bangun. Dengan adanya regulasi yang jelas, para pemilik atau pengembang properti akan lebih mudah untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam proses perizinan.

### **2.Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Pemerintah Kota Bandung juga bertanggung jawab

untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui dan memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam IMB. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait pembangunan juga penting untuk menjaga tertib bangun.

### **3.Peran partisipatif**

Selain dari pemerintah sendiri, partisipasi masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan tertib bangun. Pemerintah Kota Bandung dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan publik, konsultasi, atau forum-forum partisipatif lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhitungkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

### **4.Peningkatan kualitas bangunan**

Pemberian IMB tidak hanya sekedar formalitas administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun memenuhi standar kualitas tertentu. Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan proses pemberian IMB sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun memiliki kualitas yang baik, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

### **5.Edukasi dan penyuluhan**

Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan-peraturan terkait pembangunan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberian IMB dan konsekuensi dari melanggar peraturan, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terkait pembangunan yang dapat mengganggu tertib bangun.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan peran aktif pemerintah Kota

Bandung dalam pemberian IMB merupakan langkah yang positif dalam mewujudkan tertib bangunan, Dengan mengedepankan efisiensi,transparansi,dan penegakan hukum yang ketat,diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.

Melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat,partisipasi masyarakat,peningkatan kualitas bangunan,serta kegiatan edukasi dan penyuluhan,pemerintah dapat menciptakan lingkungan pembangunan yang teratur,aman,dan berkelanjutan. Tertib bangunan yang terwujud akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kota secara keseluruhan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat,serta memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota Bandung.

Dengan demikian, peranan pemerintah Kota Bandung dalam pemberian IMB tidak hanya sebagai proses administrative semata,tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

## REFERENSI

- Rutdatin, D., Astuti, P., & Herawati, N. R. (2017). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 281-290.
- Yohanes Siringo-ringo, S. H. (2013). Kewenangan Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Utara Terhadap Bangunan Tanpa Imb Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dki Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan (Studi Kasus Pembokaran Bangunan Di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. *Constitutum*, 12(2).
- Kartikasari, W. S. Efektivitas Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Menertibkan Bangunan Di Kota Ambon.
- Nugrahani, P. Y. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penatausahaan Aset Daerah (Studi Kasus Pada 27 SKPD di Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- Suparman, N. (2017). Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (BPPTPM) kabupaten cianjur provinsi jawa barat. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(1), 41-56.
- Rahman, G. S., Bekti, H., & Munajat, M. E. (2019). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 100-106.
- Rusmanto, W. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Yohanes Siringo-ringo, S. H. (2013). Kewenangan Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Utara Terhadap Bangunan Tanpa Imb Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dki Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan (Studi Kasus Pembokaran Bangunan Di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. *Constitutum*, 12(2).
- Sutriasih, T. (2012). Optimalisasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Yang Tertata. *Jurnal*.
- Madya, F. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 1-8.

Elora, D. (2021). Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 963-968.

Mulyadi, H. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 85-103.